

Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Ekowisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara

Nur Saadah

Program Studi Hukum Kenotariatan, UII Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: nur.saadah0597@gmail.com

Abstract. *Ecotourism in Baubau City has not developed optimally despite having great natural resource potential. Weak coordination between institutions is one of the obstacles to the implementation of policies related to ecotourism development. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the role of ecotourism development institutions in supporting ecotourism policies in Baubau City. This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation and in-depth interviews with related agencies and local ecotourism actors. The results showed that coordination between ecotourism development institutions is still weak so that the implementation of ecotourism policies is not optimal. Recommendations include the need to improve cross-sectoral coordination and program synchronization, optimize the function of ecotourism institutions, and increase human resource capacity. This research is useful as an evaluation for policy makers related to ecotourism institutional reform in Baubau City.*

Keywords: *Ecotourism Institution, Ecotourism Policy, Coordination, Baubau City*

Abstrak. Ekowisata di Kota Baubau belum berkembang optimal meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan terkait pengembangan ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran kelembagaan pengembangan ekowisata dalam mendukung kebijakan ekowisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam terhadap dinas/instansi terkait serta pelaku ekowisata lokal. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antar lembaga pengembangan ekowisata masih lemah sehingga implementasi kebijakan ekowisata menjadi tidak optimal. Rekomendasi yang diberikan antara lain perlunya meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan sinkronisasi program, optimalisasi fungsi kelembagaan ekowisata, serta peningkatan kapasitas SDM. Penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi bagi pemangku kebijakan terkait reformasi kelembagaan ekowisata di Kota Baubau.

Kata Kunci: Kelembagaan Ekowisata, Kebijakan Ekowisata, Koordinasi, Kota Baubau

LATAR BELAKANG

Dalam sudut pandang politik dan manajemen, otonomi daerah merupakan alat yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan masyarakat di daerah. Hal ini terutama penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Maka, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹ Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi pariwisatanya, termasuk ekowisata. Mereka dapat

¹ Drs. Nuruddin, M.H. dan Dr.H.Ahmad Muhasin, M.HI., *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Lombok Barat, CV Alfa Press, 2022), hlm 192

membuat kebijakan dan perencanaan yang lebih tepat sesuai kondisi dan keunikan daerahnya. Mereka dapat membuat kebijakan dan perencanaan yang lebih tepat sesuai kondisi dan keunikan daerahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih mengakomodasi aspirasi dan peran masyarakat setempat dalam pengembangan ekowisata. Ini penting untuk mendorong pembangunan berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, promosi, dan pelestarian ekosistem di daerahnya guna mendukung pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, sejalan dengan semangat otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah yang tepat akan sangat mendukung upaya pengembangan ekowisata.

Kota Baubau memiliki potensi alam luar biasa untuk pengembangan ekowisata seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan habitat flora fauna unik. Namun, pengembangan sektor ekowisata di Kota Baubau dinilai masih belum optimal. Salah satu faktor penghambat adalah lemahnya kelembagaan dan koordinasi antar lembaga terkait pengembangan ekowisata. Saat ini beberapa lembaga terlibat pengembangan wisata di Kota Baubau antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta organisasi ekowisata tingkat lokal. Namun, koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan antar lembaga dinilai masih belum efektif. Akibatnya, implementasi kebijakan terkait pengembangan ekowisata juga menjadi tidak optimal, seperti masalah sampah di beberapa lokasi ekowisata yang belum tertangani dengan baik. Maka, penelitian mengenai efektivitas peran kelembagaan pengembangan ekowisata dalam mendukung implementasi kebijakan terkait penting dilakukan, sebagai evaluasi dan masukan perbaikan ke depan. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagaimana meningkatkan koordinasi dan optimalisasi peran berbagai lembaga terkait.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Ekowisata

- Definisi ekowisata dan prinsip-prinsipnya
- Tujuan dan manfaat ekowisata
- Komponen-komponen dalam pengembangan ekowisata (atraksi alam, infrastruktur, sumber daya manusia, pemasaran, dll.)

2. Kebijakan Hukum dan Regulasi Ekowisata
 - Undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait ekowisata (baik di tingkat nasional maupun daerah)
 - Analisis terhadap kekuatan hukum dan implementasi kebijakan ekowisata di Kota Baubau
3. Kelembagaan Pengembangan Ekowisata
 - Teori organisasi dan kelembagaan
 - Peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pengembangan ekowisata
 - Struktur dan tata kelola kelembagaan ekowisata di Kota Baubau
4. Efektivitas Kelembagaan
 - Konsep efektivitas organisasi dan kelembagaan
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan (sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, dll.)
 - Indikator dan pengukuran efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata
5. Implementasi Kebijakan Hukum Ekowisata
 - Teori implementasi kebijakan
 - Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan ekowisata
 - Peran kelembagaan dalam mendukung implementasi kebijakan ekowisata di Kota Baubau
6. Studi Empiris dan Penelitian Terdahulu
 - Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini
 - Pembelajaran dari studi kasus dan praktik baik di daerah lain
7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
 - Mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel utama dalam penelitian
 - Merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan kajian teoritis dan studi empiris

Kajian teoritis ini akan memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat untuk melakukan penelitian tentang efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata dalam mendukung implementasi kebijakan hukum terkait ekowisata di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini penting untuk memahami peran kelembagaan dalam mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan mulai sejak penelitian turung langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 10 Febuari 2024. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi untuk menganalisis efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Bau-Bau. Objek penelitian ini adalah kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Bau-Bau, yang meliputi dinas/badan terkait pengembangan ekowisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelaku usaha ekowisata, dan masyarakat setempat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan untuk mengamati implementasi kebijakan terkait ekowisata, wawancara mendalam untuk menggali data dari informan terkait peran dan efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen dan data terkait kebijakan dan program kelembagaan pengembangan ekowisata. Metode analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dan menggunakan bahan referensi.

HASIL TEMUAN DAN PENELITIAN

Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekowisata Di Kota Baubau Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Ekowisata

Efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Bau-Bau dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya koordinasi antar institusi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, dan pelaku usaha ekowisata dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pengembangan ekowisata, antara lain:

1. Minimnya koordinasi antar instansi terkait

Kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan dan pengelolaan ekowisata masih sangat terbatas di daerah tersebut. Sebagian besar pegawai di dinas dan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup belum memahami konsep ekowisata berkelanjutan. Mereka baru paham terkait pengelolaan destinasi wisata konvensional namun belum menguasai prinsip-prinsip konservasi alam, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain minimnya kapasitas pegawai dinas, keterbatasan pemahaman praktik ekowisata berdampak pula pada penganggaran program-program pengembangan pariwisata. Banyak anggaran yang dialokasikan untuk festival budaya skala besar

dan promosi tempat wisata populer yang sudah ada, bukannya untuk pengembangan dan promosi lokasi-lokasi baru ekowisata yang berpotensi tinggi namun masih tersembunyi. Minimnya SDM dan pendanaan untuk optimalisasi ekowisata ini menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah setempat bersama berbagai pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan manfaat sektor pariwisata bagi alam, ekonomi, dan kesejahteraan penduduk secara luas.

2. Masing-masing instansi seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, asosiasi pengusaha wisata, dan komunitas pecinta alam menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing dalam pengembangan ekowisata. Namun, kerja sama dan koordinasi lintas sektoral di antara instansi-instansi ini sangatlah lemah dan jarang dilakukan. Tidak ada forum atau wadah khusus yang dapat menjembatani komunikasi dan membangun sinergi di antara para pemangku kepentingan ekowisata ini secara rutin. Akibatnya, program-program ekowisata yang digulirkan berjalan sendiri-sendiri dan sering tumpang tindih karena tidak ada koordinasi yang baik. Lemahnya koordinasi ini sangat disayangkan mengingat masing-masing pemangku kepentingan sebenarnya memiliki peran strategis bagi pengembangan ekowisata di wilayah tersebut. Karenanya, pembentukan forum ekowisata yang melibatkan berbagai lembaga dan komunitas ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menyatukan program pengembangan ekowisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. Lemahnya implementasi kebijakan dan program

Koordinasi yang rendah antar instansi terkait berdampak pada tumpang tindih dan ketidakkonsistenan kebijakan pengembangan ekowisata di wilayah tersebut. Misalnya, Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup masing-masing memiliki program yang berbeda terkait pengembangan desa wisata ramah lingkungan tanpa ada sinkronisasi dan pembagian tugas yang jelas. Akibatnya banyak program yang dilakukan cenderung bersifat sementara karena kekurangan dukungan dan komitmen dari berbagai lembaga secara bersamaan dan komprehensif. Banyak program kunjungan wisatawan ke desa wisata hanya berjalan kurang dari satu tahun karena pendanaan tidak berlanjut atau kekurangan program pemberdayaan dan sosialisasi bagi masyarakatnya. Kurangnya kolaborasi instansi dan keterlibatan pemangku kepentingan ekowisata lainnya seperti akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat inilah yang menyebabkan sulitnya mencapai ekowisata yang

holistik dan berkelanjutan di wilayah ini. Perlu forum komunikasi yang intensif untuk mengatasinya. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekowisata

4. Lemahnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan hidup berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan dan promosi potensi ekowisata yang dimiliki Kota Bau-Bau. Padahal, kota ini memiliki beragam daya tarik ekowisata mulai dari terumbu karang, hutan mangrove, hingga waterfalls yang potensinya cukup besar untuk dikembangkan. Minimnya sinergi antar para pihak terkait mengakibatkan banyak potensi alam ini belum diekspos secara luas untuk menarik kunjungan wisata. Perlu dilakukan terobosan penguatan kerja sama dan koordinasi yang baik agar kekayaan ekowisata Kota Bau-Bau bisa dipromosikan dan dimanfaatkan secara maksimal di masa depan.

Kelembagaan yang efektif, ekowisata memerlukan kelembagaan yang efektif dan terkoordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Ini mencakup pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pengusaha pariwisata, LSM lingkungan, dan masyarakat lokal. Kelembagaan yang efektif dapat memastikan ekowisata dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan partisipatif Pengembangan ekowisata memerlukan perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini penting untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Partisipasi pemangku kepentingan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen dalam implementasinya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Peningkatan kapasitas SDM masyarakat lokal sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dan mendapat manfaat dari pengembangan ekowisata. Pelatihan pemandu lokal, penginapan ramah lingkungan, dan wirausaha merupakan contoh program peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Pengelolaan lindung sumber daya Kelembagaan pengembangan ekowisata harus mampu memastikan tidak terjadinya degradasi sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik ekowisata. Pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat lokal diperlukan untuk melindungi ekosistem dan situs budaya. Pemantauan dan evaluasi berkala Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas program ekowisata sangat penting untuk memastikan pembangunan tetap berkelanjutan. Indikator-indikator pembangunan berkelanjutan perlu dipantau, seperti kondisi lingkungan, tingkat partisipasi masyarakat, dan pemerataan manfaat ekonomi. Evaluasi dapat mengidentifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan ke depan. Yang

dimana konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan The world Commission for Environmental and Development (WCED), yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB.²

Kendala Yang Dihadapi Kelembagaan Pengembangan Ekowisata Di Kota Baubau Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Ekowisata

Berdasarkan temuan penelitian mengenai hambatan yang dialami kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Bau-Bau dalam mendukung penerapan peraturan perundang-undangan terkait ekowisata, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang paham mengenai pengembangan dan pengelolaan ekowisata di daerah tersebut sangat terbatas. Sebagian besar pegawai dinas pariwisata dan lingkungan hidup belum memahami konsep ekowisata berkelanjutan dan implementasinya secara komprehensif. Mereka umumnya baru paham wisata alam konvensional dan belum expert dalam aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain keterbatasan SDM, anggaran yang disediakan pemerintah daerah juga masih sangat minim untuk pengembangan dan promosi kawasan ekowisata yang ada. Sebagian besar anggaran cenderung dialokasikan ke event budaya skala besar dan promosi tempat wisata umum yang sudah populer, bukan untuk ekowisata yang potensinya besar namun belum dikenal luas. Minimnya dukungan SDM dan financing ini sangat menghambat upaya optimalisasi sektor ekowisata di wilayah tersebut. Memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran khusus ekowisata, serta kolaborasi dengan pihak swasta diperlukan untuk memajukan sektor ini agar memberi dampak positif bagi konservasi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
2. Kerja sama atau koordinasi yang kurang kuat antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kendala dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program ekowisata di daerah tersebut. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis ekowisata, dan wakil masyarakat jarang melakukan rapat koordinasi untuk bersama-sama merancang program dan kebijakan mengenai pengembangan sektor ekowisata. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan dan setiap pemangku kepentingan seolah berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing.

² I Nyoman Sukma Ardi, Ekowisata (Pengembangan, Partisipasi local, dan Tantangan Ekowisata), (Denpasar, Cakra Press, 2017), hlm 13

Ketiadaan forum komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menyebabkan banyak program ekowisata tidak berkelanjutan atau bersifat setengah-setengah karena tidak adanya dukungan kolektif yang kuat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pembentukan forum komunikasi antar pemangku kepentingan terkait ekowisata agar dapat merumuskan program-program strategis untuk memajukan sektor ekowisata di daerah ini secara kolaboratif dan berkelanjutan.

3. Terdapat berbagai kendala teknis di lapangan yang menghambat pengembangan aksesibilitas menuju destinasi ekowisata di wilayah tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi infrastruktur yang masih minim dan rusak pada beberapa titik. Kondisi jalan yang berlubang dan sempit menyulitkan wisatawan untuk mencapai area ekowisata. Dari sisi transportasi, ketersediaan angkutan umum menuju lokasi-lokasi ekowisata juga sangat terbatas. Kebanyakan wisatawan harus mengandalkan kendaraan pribadi, sedangkan tak semua wisatawan membawa kendaraan pribadi. Selain itu, jumlah penginapan serta rumah makan di sekitar objek ekowisata juga sangat kurang. Minimnya fasilitas penunjang pariwisata ini menghambat perkembangan ekowisata di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penyediaan angkutan umum wisata, hingga pembangunan penginapan di sekitar destinasi ekowisata. Upaya-upaya ini diperlukan agar aksesibilitas menuju tempat ekowisata menjadi lebih mudah dan nyaman sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan kunjungan dan pendapatan ekowisata di wilayah ini.
4. Terdapat sejumlah hambatan teknis di lapangan yang menghambat akses menuju lokasi-lokasi ekowisata di daerah tersebut. Hambatan utama adalah minim dan rusaknya infrastruktur pendukung seperti jalan menuju lokasi ekowisata. Kondisi jalan yang rusak menyulitkan wisatawan untuk mengakses lokasi ekowisata. Selain itu, fasilitas transportasi umum menuju destinasi ekowisata juga terbatas. Keterbatasan angkutan transportasi membuat wisatawan kesulitan untuk bepergian antar lokasi ekowisata. Dari sisi akomodasi, jumlah penginapan di sekitar destinasi ekowisata juga masih sedikit. Kelangkaan fasilitas pendukung ini menjadi kendala untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut terutama bidang ekowisata. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan akomodasi perlu menjadi prioritas bagi pemerintah setempat untuk lebih mengoptimalkan potensi ekowisata yang dimiliki..

Rekomendasi kebijakan untuk Mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain Peningkatan Kapasitas SDM, Koordinasi Multi-pihak, dan Pengalokasian Anggaran yang Lebih Memadai untuk Pengembangan Sektor Ekowisata

Berdasarkan Land Administration Guidelines yang diterbitkan oleh UNECE, pengertian administrasi pertanahan (land administration) yang terkait erat dengan pencatatan tanah (land registration) sebagai dasar perencanaan wilayah kota dan reformasi pertanian perlu memperhatikan faktor-faktor efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata, seperti kelembagaan yang efektif, perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan lindung sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.³ Terdapat sejumlah faktor kunci yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja lembaga-lembaga pengembangan ekowisata di Kota Baubau dalam mendukung penerapan peraturan perundang-undangan terkait bidang ekowisata. Faktor-faktor utama yang menentukan apakah kelembagaan ekowisata ini dapat berperan optimal atau tidak dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain meliputi sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga, infrastruktur pendukung, serta partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan terkait. Jika faktor-faktor kunci ini dapat terpenuhi dengan baik, maka diharapkan kelembagaan pengembangan ekowisata akan lebih efektif bekerja sehingga mampu menerapkan berbagai program strategis, peraturan daerah, maupun keputusan gubernur terkait untuk memajukan kawasan ekowisata. Sebaliknya, jika faktor-faktor penentu ini tidak terwujud, akan sulit bagi kelembagaan ekowisata untuk berfungsi optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan sektor ini di wilayah Kota Baubau yang potensinya cukup besar, antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah

Seberapa besar keterikatan dan dedikasi Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau dalam memberikan dukungan terhadap kemajuan industri pariwisata berbasis ekologi dan lingkungan hidup akan menjadi faktor yang sangat penting dan berpengaruh. Apabila otoritas setempat memiliki komitmen yang kuat, tekad yang bulat, serta perhatian yang besar dalam mengembangkan sektor ekowisata, maka konsekuensi logis yang akan terjadi adalah mereka akan mengalokasikan porsi anggaran yang cukup signifikan dan menaruh prioritas pada kebijakan-kebijakan yang dapat memfasilitasi dan mengakselerasi pertumbuhan pariwisata ramah lingkungan di wilayah administratif mereka. Semakin tinggi tingkat kesungguhan dan fokus Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau dalam mempromosikan ekowisata, maka

³ Handi Arnowo, *Administrasi Pertanahan Di Indonesia*, (Bogor, BPN Pres:2021), hlm 2

semakin besar pula dukungan finansial yang akan disediakan dan semakin banyak pula peraturan serta regulasi yang akan dikeluarkan untuk mengakomodasi kemajuan industri pariwisata berbasis lingkungan di daerah tersebut.

2. Koordinasi multi-stakeholders

Seberapa efektif dan maksimal kinerja institusi atau lembaga terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya akan sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi dan sinergi yang terjalin antara berbagai pihak yang relevan, yakni dinas-dinas pemerintahan yang terlibat, para akademisi dan cendekiawan, para pelaku usaha di bidang pariwisata, serta komunitas-komunitas masyarakat adat setempat. Semakin baik dan erat koordinasi serta kolaborasi yang tercipta di antara pihak-pihak tersebut, maka semakin optimal pula implementasi dan penerapan kebijakan-kebijakan di bidang ekowisata yang dapat dijalankan. Koordinasi yang solid dan koheren dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dan penentu bagi efektivitas lembaga terkait dalam mengeksekusi regulasi dan program-program pengembangan pariwisata berbasis lingkungan secara maksimal dan merata di lapangan.

3. Kualitas SDM

Kemampuan, keterampilan, dan kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang bekerja di dinas-dinas atau instansi-instansi pemerintahan terkait akan menjadi faktor penting yang menentukan seberapa baik kualitas perumusan dan seberapa optimal tingkat implementasi dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan industri ekowisata di Kota Bau-Bau. Semakin mumpuni dan kompeten para pegawai dan staf di lembaga-lembaga pemerintah yang relevan dalam hal pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, maka semakin berkualitas pula proses penyusunan strategi dan regulasi untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata ramah lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu, tingkat kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia di dinas-dinas terkait juga akan berpengaruh besar terhadap seberapa optimal implementasi kebijakan ekowisata dapat diterapkan dan dijalankan di lapangan secara konkret. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia di instansi-instansi pemerintah terkait menjadi salah satu kunci penentu dalam mewujudkan agenda pengembangan ekowisata yang efektif dan berkelanjutan di Kota Bau-Bau.

4. Dukungan regulasi daerah

Keberadaan peraturan daerah yang tegas, jelas, dan mendetail terkait dengan pengelolaan industri pariwisata berbasis lingkungan hidup merupakan suatu prasyarat yang sangat krusial dan penting dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan sektor ekowisata. Adanya regulasi daerah yang komprehensif, rinci, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda tentang berbagai aspek terkait pengelolaan pariwisata ramah lingkungan akan menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam mendorong optimalisasi penerapan strategi-strategi dan program-program pemerintah untuk memajukan ekowisata. Semakin jelas, rinci, dan tegas peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan ekowisata, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan tingkat efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengakselerasi kemajuan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Baubau masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya koordinasi antar institusi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, dan pelaku usaha ekowisata dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pengembangan ekowisata. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep ekowisata berkelanjutan, minimnya anggaran khusus untuk pengembangan ekowisata, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, transportasi, dan akomodasi di sekitar destinasi ekowisata. Faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas kelembagaan pengembangan ekowisata antara lain komitmen pemerintah daerah, koordinasi multi-stakeholder, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan regulasi daerah yang kuat.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan tentang konsep dan praktik ekowisata berkelanjutan bagi pegawai di dinas terkait, akademisi, dan pelaku usaha. Membentuk forum komunikasi atau wadah koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, LSM, dan masyarakat) untuk menyusun program dan kebijakan pengembangan ekowisata secara terintegrasi. Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengembangan ekowisata, termasuk untuk

promosi, konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan perbaikan infrastruktur pendukung. Memperkuat regulasi daerah terkait ekowisata dengan menetapkan peraturan yang jelas, komprehensif, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda dalam pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program ekowisata untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan perbaikan di masa depan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kelembagaan pengembangan ekowisata di Kota Baubau dapat lebih efektif dalam mendukung implementasi kebijakan hukum terkait ekowisata dan mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Ferdinal Asman. 2017. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan (Dimulai dari Konsep Sederhana)*. Sumatra Barat: Bogor Agricultural University.
- Gunardi Djoko Winarno, Sugeng Prayitno Harianto. 2017. *Ekowisata*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadi Arnowo. 2021. *Administrasi Pertanahan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Kabupaten Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press.
- I Nyoman Sukma Arida. 2017. *Ekowisata (Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata)*. Cetakan Kedua: Cakra Press.
- Isharyanto, Maria Madalina, Ayu Torry Satriyo Kusumo. 2019. *Hukum Kepariwisata dan Pluralisme Lokal*. Surakarta: CV. Absolute Media.
- Isharyanto, Maria Madalina, Ayub Torry S.K. 2019. *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan*. Cetakan Pertama. Surakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Nuruddin, Ahmad Muhasim. 2022. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Lombok Barat: CV. Alfa Press.